



<b>News Title : Bappebti Perketat Regulasi Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia</b>	
<b>Media Name : Validnews.id</b>	<b>Journalist : Nuzulia Nur Rahma</b>
<b>Publish Date : 17 October 2024</b>	<b>Tonality : Positive</b>
<b>News Page :</b>	<b>News Value : 0</b>
<b>Resources : Kasan (Kepala Bappebti), Wan Iqbal (CMO Tokocrypto)</b>	<b>Ads Value : 0</b>
<b>Section/Rubrication : Ekonomi</b>	<b>Topic : Perba No 9 Tahun 2024</b>

## Bappebti Perketat Regulasi Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan baru yang memperketat regulasi perdagangan aset kripto di Indonesia.

Penulis: Nuzulia Nur Rahma  
Editor: Ressa Alhan



Publikasi aset kripto semakin pesat. [globe.asia](#) perkenalan aset kripto di Cilembok, Jawa Tengah, Sabtu (21/10/2022). [MakassarDokter.com](#)

**JAKARTA** - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan baru yang memperketat regulasi perdagangan aset kripto di Indonesia. Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024 ini mengubah beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 2021.

Aturan ini memfokuskan pada perlindungan konsumen, pengawasan transaksi, serta pengaturan pendaftaran Pedagang Fiskal Aset Kripto (PFAK). Salah satu hal yang digarisbawahi dalam peraturan baru ini adalah pentingnya menyediakan sistem pengawasan dan pelaporan real-time oleh Bursa Berjangka.

Kepala Bappebti Kasan mengatakan, langkah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan aset kripto. Menurutnya, dengan adanya akses langsung Bappebti ke sistem pengawasan tersebut, transparansi dan keamanan dalam perdagangan aset kripto dapat lebih terjamin.

"Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi inovasi di sektor aset kripto," ujar Kasan dalam pernyataan resmi, Kamis (17/10).

Dia menjelaskan, aturan ini juga mewajibkan Bursa Berjangka untuk secara berkala melakukan evaluasi terhadap aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik. Bursa Berjangka tidak hanya mengkaji jenis aset kripto yang ada, tetapi juga mempertimbangkan penambahan atau pengurangan jenis aset yang dapat diperdagangkan.

### **Baca Juga: Setelah Lampaui Level Rp1 Miliar, Bisakah Bitcoin Pertahankan Momentum Bullish Ini?**

"Langkah ini dianggap penting untuk menjaga dinamika pasar yang sehat serta melindungi para pelaku usaha dari potensi risiko yang tidak diinginkan," sebut dia.

Di samping itu, dia mengatakan jika Lembaga Kliring Berjangka memiliki peran penting dalam pengawasan dana pelanggan. Dana yang disimpan pada rekening terpisah wajib diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan.

Selain itu, lembaga ini juga bertanggung jawab atas penyelesaian transaksi perdagangan pasar fisik aset kripto, sehingga memberikan jaminan lebih bagi konsumen dan pelaku usaha.

Lebih lanjut, aturan ini juga memberikan panduan terkait pendaftaran Calon Pedagang Fiskal Aset Kripto (CPFAK). Calon pedagang diwajibkan memperoleh keabsahan dari Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan, paling lambat 7 hari kerja sejak peraturan ini diberlakukan pada 16 Oktober 2024.

"Apabila calon pedagang tidak memenuhi syarat tersebut, maka tanda daftar mereka dapat dibatalkan oleh Bappebti," tegas dia.

Lalu untuk pelaku usaha yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan ini, mereka wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan baru dalam jangka waktu 6 bulan.

"Jika tidak aktif dalam memfasilitasi transaksi perdagangan selama 3 bulan, Bappebti berhak membatalkan tanda daftar mereka," kata Iqbal.

### **Tanggapan Pelaku Usaha**

Menanggapi peraturan baru ini, CMO Tokocrypto, Wan Iqbal, menyatakan bahwa langkah Bappebti untuk memperkuat pengawasan merupakan hal yang positif bagi perkembangan industri kripto di Indonesia.

"Kepercayaan masyarakat terhadap aset kripto akan semakin meningkat dengan adanya sistem pengawasan yang lebih transparan dan ketat. Namun, agar lebih efektif dan mendukung pertumbuhan pasar, diperlukan adanya insentif tambahan serta tindakan tegas dalam penerapannya," kata Iqbal.

Dia juga menambahkan bahwa Tokocrypto, berkomitmen untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan terus berinovasi dalam menyediakan layanan terbaik bagi para penggunanya.

### **Baca Juga: Kejangung Sebut Kripto Kerap Dimanfaatkan Untuk Pencucian Uang**

Menurut Iqbal, peraturan baru yang diumumkan Bappebti ini adalah langkah dalam menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang lebih aman dan transparan di Indonesia.

"Regulasi dan perizinan dari pihak berwenang memberikan rasa aman baik bagi investor maupun pelaku usaha. Ini memastikan bahwa platform-platform yang beroperasi memenuhi standar keamanan, transparansi, dan kepatuhan hukum yang diperlukan," tutur Iqbal.

Di samping itu, dia menuturkan, langkah utama yang dihadapi pada CPFAK untuk mendapatkan izin PFAK meliputi beberapa aspek, seperti pemenuhan kewajiban modal dan standar keamanan, hambatan dari sisi biaya operasional dan administratif.

Selanjutnya proses perizinan dapat memulihkan investasi yang signifikan, terutama untuk memastikan pemenuhan syarat teknis dan operasional yang diawasi oleh regulator.

"Beberapa pelaku usaha mungkin menghadapi tantangan dalam memahami aturan yang berlaku atau perubahan regulasi di sektor kripto," imbuhnya.